



PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

RANCANGAN AKHIR

RENJA

**RENCANA KERJA
2025**

INSPEKTORAT

Rencana Kerja 2025

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga “***Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025***” telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan Tahun Kedua pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026, untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta untuk pemenuhan tujuan Kota Bekasi yang pertama “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel” dengan arah kebijakan “Penguatan Fungsi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Layanan Berbasis Digital” yang didalamnya memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Inspektorat Kota Bekasi disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun IaIu, perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Rencana Kerja 2025

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi,

INSPEKTUR KOTA BEKASI, t.



IIS WISYNUWATI, S.Sos.,CRA.,CRP.,CGCAE
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19680731 198803 2 002

Rencana Kerja 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ITKO TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi	49
3.3 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat	51
3.4 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	60
BAB V PENUTUP	72

Rencana Kerja 2025

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja ITKO dan Pencapaian Rencana Strategis ITKO S.D Tahun 2023 Kota Bekasi	12
Tabel 2.2 Sasaran Srtategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022	20
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	22
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.....	24
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	26
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	27
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	28
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70.....	29
Tabel 2.9 Capaian Indikatror Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Yang Mmpu Mempertahankan Prediat WBBM.....	29
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Persentae Perangkat daerah dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71	30
Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Penata Usahaan Aset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material	31
Tabel 2.12 Capaian Indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	31
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP.	32
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR) ...	32
Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	34
Tabel 2.14 Revieu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	40
Tabel 3.1 Tujuan,Sasaran,Indikator dan Target Inspektorat Daerah Kota Bekasi	50
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat	52
Tabel 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dan perhitungan maju tahun 2025.....	53
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	3

Rencana Kerja 2025

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja SKPD	
.....	3
Gambar 3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi	
.....	34

Rencana Kerja 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) yang ditetapkan oleh kepala PD. Rancangan Renja-PD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra-PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dimasa berakhirnya kepemimpinan Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) yang menyatakan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah Provinsi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi dan mengacu kepada Rancangan RKP dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah

Rencana Kerja 2025

daerah dan juga memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai model rencana pembangunan daerah, disusun berdasarkan hasil kinerja (evaluasi) pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada RKPD. Sementara RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) juga memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program, kegiatan dan subkegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-PD dibahas dalam forum PD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

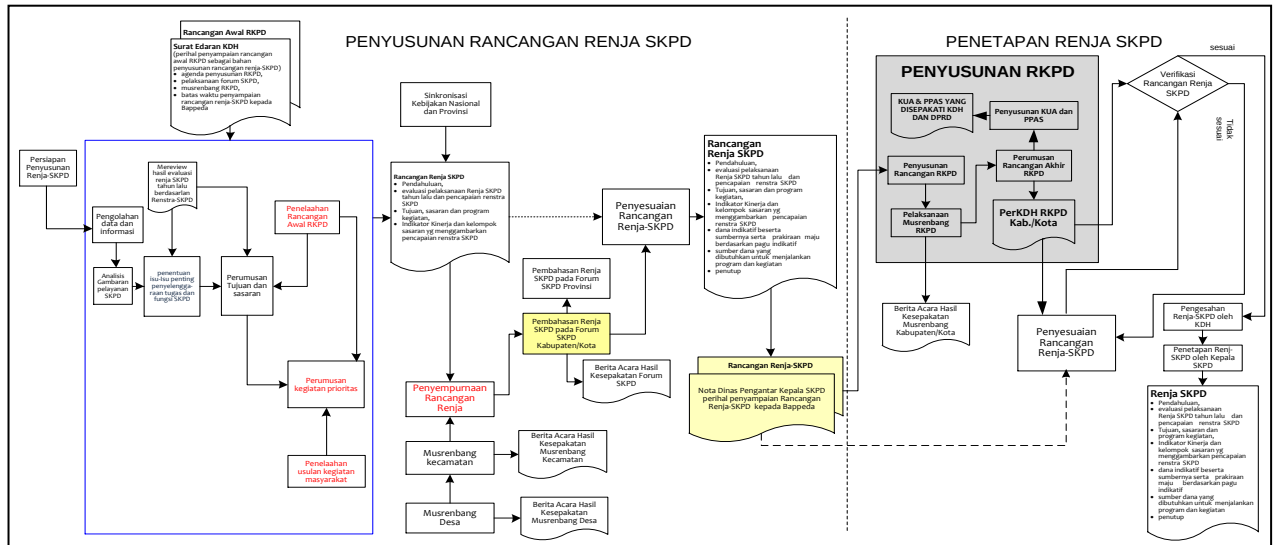
Renja-PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-PD) kedalam rencana dan program. Renja-PD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra-PD kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Penjabaran dari Renstra-PD sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya”. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026.

Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, , kegiatan dan subkegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

Rencana Kerja 2025

Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Proses penyusunan Renja-PD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Gambar 1.1
Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang telah disusun di tahun 2023 Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2025 memasuki tahun kedua dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai **Quality Assurance** yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan" dan "penjaminan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Rencana Kerja 2025

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);

Rencana Kerja 2025

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;

Rencana Kerja 2025

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (1/6/2022));
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 82 Seri D);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;
31. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 050/Kep.07-Bappelitbangda/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan serta menyediakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan gambaran kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tujuan serta sasaran untuk dijadikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi;
2. Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Mendukung tercapainya RPD Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

Rencana Kerja 2025

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi tahun lalu dan capaian kinerja terhadap Renstra.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RPD

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

Rencana Kerja 2025

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

B A B II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2023. Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 42.987.716.180,-.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 melaksanakan 3 Program, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2). Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 3). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Adapun program-program dan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp. 35,122,904,280,- didukung dengan 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan alokasi dana sebesar Rp. 1.154.248.000,- dengan 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, alokasi dana sebesar Rp. 1,321,833,000- didukung dengan 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Rencana Kerja 2025

Realisasi fisik rata-rata seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 **mencapai 98.94%** dan realisasi **keuangan 92.22%**, sehingga efisiensi biaya pada tingkat program hingga 7.78%. Persentase efisiensi tersebut dikarenakan pada level kegiatan terdapat banyak efisiensi penggunaan sumber daya di sebagian besar kegiatan dan adanya sumber daya yang tidak diserap serta kegiatan yang dihilangkan anggarannya pada APBD.

Untuk kegiatan yang dihilangkan anggarannya pada APBD Perubahan (APBD-P), tetap menghasilkan output walaupun anggarannya tidak tersedia atau anggarannya dihilangkan.

Upaya efisiensi anggaran telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD ke kantor Inspektorat dan juga melalui Daring (personal meeting) dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien dilakukan pula peningkatan kabapilitas APIP yaitu dengan memanggil narasumber ahli juga kompeten baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak swasta untuk melakukan transfer pengetahuan kepada APIP Kota Bekasi.

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 melaksanakan 3 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Program-program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.723.006.000,- terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.847.648.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.518.720.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Rencana Kerja 2025

Rencana Kerja 2025

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ITKO DAN
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS ITKO S.D TAHUN 2023
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	#N/A	13 Laporan	13 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/b ulan	#N/A	110 Orang/bu lan	110 Orang/bul an	102	120 Orang/bul an	120 Orang/bul an	100%
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	#N/A	10 Laporan	10 Laporan	103	1 Laporan	1 Laporan	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
						Akhir Tahun SKPD								
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	#N/A	1 Paket	1 Paket	105	1 Paket	1 Paket	100%
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	#N/A	70 Orang	70 Orang	106	120 Orang	120 Orang	100%
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang	1 Paket	#N/A	1 Paket	1 Paket	108	1 Paket	1 Paket	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
						Disediakan								
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	#N/A	4 Paket	4 Paket	109	4 Paket	4 Paket	100%
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	#N/A	2 Paket	2 Paket	110	2 Paket	2 Paket	100%
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	#N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	111	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	#N/A	1 Laporan	1 Laporan	112	1 Laporan	1 Laporan	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	#N/A	400 Laporan	400 Laporan	113	450 Laporan	450 Laporan	100%
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	5 Unit	115	1 Unit	1 Unit	100%
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	44 Unit	44 Unit	116	25 Unit	25 Unit	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	#N/A	12 Laporan	12 Laporan	118	100 Laporan	100 Laporan	100%
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	#N/A	36 Laporan	36 Laporan	119	24 Laporan	24 Laporan	100%
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	#N/A	12 Laporan	12 Laporan	120	12 Laporan	12 Laporan	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	#N/A	7 Unit	7 Unit	122	12 Unit	12 Unit	100%
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	#N/A	37 Unit	37 Unit	123	12 Unit	12 Unit	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	#N/A	156 Unit	156 Unit	124	200 Unit	200 Unit	100%
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	#N/A	1 Unit	1 Unit	125	1 Unit	1 Unit	100%
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal	80%							
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	91%							

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	100%							
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan	5 Dok					5 Dok	5 Dok	100%
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	#N/A	#N/A	#N/A	131	1 Lap	1 Lap	100%
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Lap	#N/A	4 Laporan	4 Laporan	132	4 Laporan	4 Laporan	100%
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Lap	#N/A	5 Laporan	5 Laporan	133	8 Lap	8 Lap	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	44 PD	#N/A	2 Laporan	2 Laporan	134	44 PD	44 PD	100%
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepaka tan	#N/A	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	135	1 Kesepak	1 Kesepak	100%
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokume n	#N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	136	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	5Dok					5 Dok	5 Dok	100%
6	1	2	2	1	Penanganan	Jumlah Laporan	1	#N/A	1 Laporan	1 Laporan	138	1 Laporan	1 Laporan	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
					Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan							
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	#N/A	1 Laporan	1 Laporan	139	7 Laporan	7 Laporan	100%
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-							
						Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	39%							
						Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	100%							
						Level Kapabilitas APIP	3							

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan	5 Dok					5 Dok	5 Dok	100%
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	#N/A	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	146	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	#N/A	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	147	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	5 Dok					5 Dok	5 Dok	100%
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	3 PD	#N/A	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	149	3 PD	3 PD	100%

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 PD	#N/A	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	150	44 PD	44 PD	100%
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	#N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan	151	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 PD	#N/A	#N/A	#N/A		44 PD	44 PD	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2023 adalah tahun terakhir dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 perubahan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2018-2023 Perubahan yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 3, sebagai berikut:

Rencana Kerja 2025

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Inspektorat	84,35	84,40	100,06
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	100	77.27	77.27
		Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01	41	0	0
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	92	88.69	96.40
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80	78.80	97.25
		Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	5	0	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	1	0	0
		Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	100	100	100
2	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	3	3	100
		Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	2	2,807	140,33

Sumber : Realisasi sampai dengan triwulan IV Capaian Program Indikator Tahun 2023 Perubahan RPJMD 2018-2023

Rencana Kerja 2025

Dari data tersebut di atas, bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Adanya penurunan capaian indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas dengan target 100% pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2022 capaiannya adalah 91.19% sementara hasil evaluasi AKIP tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 77.27 % dari 100% yang ditargetkan pada tahun ini. Beberapa penyebab terindikasi antara lain :

1. Masih kurangnya komitmen pimpinan dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Keterbatasan SDM yang mumpuni yang mampu menerapkan akuntabilitas kinerja.

Senada dengan AKIP, penerapan Zona Integritas sebagai bagian maksimal penerapan wilayah bebas korupsi (WBK) juga tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70, dikarenakan adanya persyaratan penilaian kedua indikator tersebut yang diatur dalam Permenpan RB No:90/2021, Dimana ZI baru bisa diajukan minimal daerah mencapai indikator WBBM.

Selain itu yang tidak mencapai target adalah indikator kinerja jumlah perangkat daerah yang mampu mempertahankan predikan WBBM. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut, antara lain :

1. Masih lemahnya komitmen pimpinan OPD untuk menciptakan area kerja yang bebas korupsi. Indikasi masih terdapat gratifikasi dan pungutan illegal menjadi tolak ukur yang sulit mengungkap Pembangunan zona kerja yang bebas korupsi;
2. Belum mencukupi dan memadainya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik;
3. Belum terbangunnya budaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Masih ada indikasi Gratifikasi;
5. Membangun stigma positif kepada masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang diberikan.

Rencana Kerja 2025

Solusi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM di Tahun 2023, antara lain :

1. Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mempertahankan predikat Wilayah mendapat Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM).
 2. Melakukan pendampingan terhadap pemenuhan komponen pengungkit dengan pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kelengkapan dokumen Perangkat Daerah dalam mempertahankan predikat WBK terhadap RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid agar dapat mempertahankan predikat WBK dan menjadi WBBM tahun 2023.
 3. Melakukan pendampingan peningkatan komponen pengungkit kepada Perangkat daerah yang dijadikan pilot proyek pencapaian ZI menuju WBK/WBBM.
- Sosialisasi secara langsung dan melalui media yang ada untuk terus menciptakan penyelenggara yang bersih (clean Governance) dan menghindari hal hal yang bertentangan seperti gratifikasi dan korupsi.

2.3.1 Nilai Sakip Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, berikut adalah capaian indikator nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi:

Tabel.2.3
Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Realisasi Tahun 2023
1	Nilai AKIP Inspektorat	84.35	84.40	100.06

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa Target dari Indikator kinerja utama Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 84.35 dengan

realisasi kinerja mencapai 84.40 atau sebesar 100,06% dengan demikian hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 84,40 (hasil dari LKE - Lembar Kinerja Evaluasi) atau kategori "A" dengan interpretasi Memuaskan.

2.3.2 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang telah dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Rencana Kerja 2025

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori BB ke Atas)}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel. 2.4
Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP	
		PREDIKAT	NILAI
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A	84,57
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	A	84,56
3	INSPEKTORAT DAERAH	A	84,40
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A	82,16
5	SEKRETARIAT DAERAH	A	81,85
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A	81,43
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	A	80,97
8	DINAS KESEHATAN	A	80,70
9	BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	80,48
10	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	BB	79,92
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BB	79,10
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	BB	79,04
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BB	78,84
14	DINAS PERHUBUNGAN	BB	78,41
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BB	78,14
16	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BB	78,14
17	KECAMATAN MEDAN SATRIA	BB	77,39
18	DINAS SOSIAL	BB	77,26
19	DINAS PEMADAN KEBAKARAN	BB	77,11

Rencana Kerja 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP	
		PREDIKAT	NILAI
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BB	76,99
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH	BB	76,01
22	KECAMATAN RAWALUMBU	BB	75,95
23	KECAMATAN JATISAMPURNA	BB	75,57
24	KECAMATAN PONDOKGEDE	BB	75,52
25	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BB	75,35
26	KECAMATAN PONDOK MELATI	BB	75,14
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BB	75,14
28	KECAMTAN BEKASI TIMUR	BB	75,09
29	KECAMATAN BEKASI SELATAN	BB	75,07
30	KECAMATAN BANTARGEBAH	BB	74,50
31	DINAS TATA RUANG	BB	72,83
32	KECAMATAN BEKASI UTARA	BB	72,75
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BB	72,06
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BB	70,43
35	KECAMATAN MUSTIKA JAYA	B	68,81
36	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	B	67,78
37	KECAMATAN BEKASI BARAT	B	63,41
38	SEKRETARIAT DPRD	B	63,38
39	DINAS PENDIDIKAN	B	60,06
40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B	60,06
41	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	CC	57,19
42	KECAMATAN JATIASIH	CC	56,55
43	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	CC	55,38
44	DINAS TENAGA KERJA	CC	51,64

Sumber Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi AKIP yang Kategori “BB” Ke atas pada tahun 2023 adalah sebanyak 77,27% dari target 100%, dikarenakan ada 10 perangkat daerah yang memperoleh nilai dibawah 70 yang berarti memperoleh predikat B kebawah. Penyebabnya kurangnya bukti yang mampu mengukuhkan penguatan nilai menjadi salah satu sebab AKIP perangkat daerah tidak tercapai. Akibatnya dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja 2025

Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori “BB” Ke atas) Tahun 2023 turun atau tidak mencapai target.

2.3.3 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Penyelenggaraan atas penerapan SPIP belum melibatkan seluruh OPD dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa:

1. SPIP mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risks, and Control);
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
3. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah;
4. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan: Strategi operasional dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko;
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkat kegiatan; dan
6. Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP Minimal 3.01}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Rencana Kerja 2025

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	41	100	243.90

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP Terintegrasi pada pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022/2023

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian target Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dengan capaian kinerja yang terealisasi dari target 41 dengan realisasi sebesar 100 atau 243.90 %.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bekasi dilakukan pada 10 (Sepuluh) Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Dinas Sosial;
- 6) Dinas Tenaga Kerja;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2022 sampai dengan Oktober 2023. Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022/2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor sebesar "3,5459", semua perangkat daerah yang dilakukan penilaian semuanya memperoleh nilai di atas 3.01 yang menjadi target pada Renstra Inspektorat 2018-2023 perubahan.

2.3.4 Persentase Tindaklanjuti Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

$$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2.6

Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	Persen	92	88.69	96.40

Sumber: rekapitulas hasil tindaklanjut temuan eksternal sampai dengan triwulan III 2023

Indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjut atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Tindak lanjut Audit tahun sampai dengan triwulan III tahun 2023.

2.3.5 Persentase Tindaklanjut Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$
--

Rencana Kerja 2025

Tabel 2.7

Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Internal	Persen	80.00	78.8	98.50

Sumber: realisasi tindaklanjuti hasil temuan internal sampai dengan triwulan III 2023

Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil rekomendasi temuan APIP tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peran APIP sebagai penjamin kualitas dan konsultan kinerja PD serta mengurangi terjadinya temuan yang berulang-ulang. Realisasi pencapaian target indikator ini bersumber dari Tindak lanjut temuan internal sampai dengan triwulan III tahun 2023 .

2.3.6 Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70 dan Jumlah Perangkat Daerah Yang Mampu Mempertahankan Predikat WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi merupakan Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja 2025

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB

Tabel 2.8

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	OPD	5	0	0%

Sumber : Hasil evaluasi atas pemenuhan komponen pengungkit Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Dari 20 OPD/Unit Kerja Layana yang dilakukan penilaian semuanya tidak ada yang mendapatkan nilai minimal 70 dan dapat disimpulkan bahwa dari target 5 OPD/Unit kerja layanan yang ditargetkan tidak ada unit kerja layanan yang mendapatkan nilai minimal 70 ini yang mengakibatkan tidak terealisasinya nilai ZI minimal 70.

Tabel 2.9

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM	OPD	1	0	0%

Sumber : Hasil evaluasi atas pemenuhan komponen pengungkit Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Sedangkan untuk indikator jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM, dari 1 target dan belum dapat memenuhi realisasi yang ditentukan, karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB Nomer: B/09/PW.03/2022 tentang Seleksi Administrasi ZI Menuju WBK/WBBM tahun yang mewajibkan Sakip

Rencana Kerja 2025

Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan Predikat BB dan dengan nilai opini kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (WTP).

2.3.7 Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi bersama sama Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Tabel.2.10

Capaian Indikator Kinerja Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71	persen	100	100	100%

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022/2023

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa capaian indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dari target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2023, maka Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pemerintah Kota Bekasi memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi, dengan kategori Bersih dari Korupsi.

2.3.8 Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material dan Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material

Saat menentukan tingkat materialitas dari suatu kesalahan penyajian, auditor juga harus mempertimbangkan seberapa besar pengaruh salah saji tersebut terhadap bagian-bagian laporan keuangan lainnya. Pengaruh semacam ini disebut sebagai tingkat resapan atau rembetan (pervasiveness). Suatu salah saji dikatakan pervasive apabila salah saji tersebut memiliki pengaruh pada akun lain.

Pertimbangan atas pervasive dapat didasarkan pada 3 faktor berikut:

1. Kompleksitas;
2. Proporsi;
3. Pengungkapan yang bersifat fundamental.

Tabel.2.11
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material	persen	100	100	100

Tabel.2.12
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material	persen	100	100	100

Rencana Kerja 2025

Dari ke dua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi perangkat daerah dengan penatausahaan asset salah satu yang tidak melebihi nilai material dan Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material sudah baik.

2.3.9 Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi consulting dan quality assurance atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Level Peningkatan Kapabilitas APIP Hasil Evaluasi oleh BPKP

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor LHP-981/PW10/6/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal

Rencana Kerja 2025

Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah berada pada Level 3 (Delivered) dengan skor 3,00.

2.3.10 Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki kebijakan tentang penerapan manajemen risiko melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 700/Kep.381-ITKO/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen 2 Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Namun kebijakan manajemen risiko belum mengacu pada Peraturan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah daerah.

Tabel 2.14

Capaian Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MR)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Penerapan manajemen Risiko (MR)	Nilai	2	2,807	140,33

Sumber : laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegritas pada pemerintah kota bekasi tahun 2022/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022/2023, dengan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3.919 dari target 2 yang ditentukan pada tahun 2023 dengan demikian realisasi tahun 2023 tercapai.

Rencana Kerja 2025

Rencana Kerja 2025

Tabel 2.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA ITKO					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nilai LAKIP Inspektorat	-	-	84.35	84,25	84,30	84,35	-	84,2	83,32	84,36	84,30	84,35	Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada PD tahun 2023
2.	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi AKIP BB Ke atas	-	-	100%	-	-	-	-	90%	93,18	95,35	-	-	Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada PD tahun 2023
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada PD tahun 2023
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3,01	-	-	41%	36,50	36,60	36,70	-	Level 3	36,5	53,01	36,60	36,70	Laporan hasil PM SPIP terintegritas pada Pemerintah Kota Bekasi No. 060/233/SETDA.org

Rencana Kerja 2025

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA ITKO					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2025	2026	
4	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	-	-	92%	91%	91%	91%	-	90,97%	90,52	90.40	91%	91%	Realisasi Tindaklanjutan sampai dengan semester I tahun 2023
5	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal			80%	80%	80%	80%	-	75%	79,01%	80.00%	80%	80%	Realisasi Tindaklanjutan sampai dengan Semester I tahun 2023
6	Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Daerah dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	-	-	5 OPD	-	-	-	NA	1 OPD	2 OPD	3 OPD	-	-	karena dari 20 PD/Unit kerja layanan yang dinilai tidak ada satupun yang memperoleh nilai minimal 70 ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan hasil evaluasi atas pemenuhan komponen pengungkit Zina Integritas menuju WBK dan WBBM.
7	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	-	-	1 OPD	- OPD	-	-	NA	0 OPD	1 OPD	0 OPD	-	-	Tidak tercapai karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB np: B/09/PW.03/2022 tentang seleksi administrasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2022 mensyaratkan

Rencana Kerja 2025

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA ITKO					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2025	2026	
														Nililai Minimal SAKIP Pemerintah Kota minimal BB.
8	Presentase Perangkat Daerah dengan nilai Evaluasi Persepsi Korupsi Minimal 3.71	-	-	100%	-	-	-	NA	100%	100%	100%	-	-	penilaian mandiri survey auditor inspektorat dilakukan 2 tahun sekali
9	Presentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak melebihi Nilai Material	-	-	100	-	-	-	-	-	90%	100%	-	-	Laporan Hasil Reviu Lapon Keuangan Masing Masing Perangkat Daerah
10	Presentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kesalahan Penatausahaan aset salah saji Tidak melebihi Nilai Material	-	-	100	-	-	-	-	-	90%	100%	-	-	Laporan Hasil Reviu Lapon Keuangan Masing Masing Perangkat Daerah
11	Tingkat Level Kapabilitas APIP	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Laporan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi nomor LHP-981/PW10/6/2022
12	Nilai Penerapan Manajemen Risiko	-	-	2	-	-	-	-	1.94	2	2,450	3	3	Laporan Hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022/2023

Rencana Kerja 2025

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyebutkan bahwa Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sumber daya Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja 2025

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal sehingga masih adanya temuan yang berulang baik internal dan eksternal baik yang berdampak secara administrasi maupun secara hukum	Belum optimalnya pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas	Lemahnya pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah
			Kurang optimalnya penyusunan perencanaan di perangkat daerah
			Perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota tidak sinkron
			Rendahnya sumber daya manusia penyusun laporan keuangan di perangkat daerah
			Perencanaan pencairan yang menumpuk di akhir tahun
			Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap
			waktu penyusunan laporan keuangan yang terlalu singkat
			Lemahnya kerjasama antar lembaga
			Perbedaan persepsi antar lembaga
			Rendahnya tindak lanjut temuan pada perangkat daerah
			Bahasa rekomendasi yang susah dipahami
			Kesenjangan kemampuan APIP
			Rekomendasi tidak bisa dijalankan
			Tidak ada bagian evaluasi pelaporan
		masih adanya temuan yang berdampak hukum yang melibatkan aparat sipil negara	Rendahnya sanksi bagi aparat yang tidak menindak lanjuti hasil temuan
			Masih rendahnya hukuman disiplin bagi pelaku pelanggaran
			Pelaku yang sudah terbukti melanggar berdasarkan hasil audit tidak dilimpahkan ke aparat penegak hukum

Rencana Kerja 2025

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal	Belum semua perangkat daerah memiliki risk register dan manajemen resiko
			Kurang koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengawasan
			Belum tersedia aplikasi pelaksanaan pengawasan
			Kurangnya kompetensi sdm penyusun kebijakan pengawasan
			Belum lengkapnya eviden penyusunan PKPT
			Kebijakan pengawasan yang sudah disusun tidak dilaksanakan
			Publikasi pengawasan yang belum optimal
		Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pendampingan dan asistensi yang efektif dan menghasilkan kegiatan pendampingan dan layanan konsultasi yang berkualitas	lemahnya pengetahuan tentang urusan wajib perangkat daerah yang harus dilaksanakan
			Belum berkembangnya kesadaran perangkat daerah tentang pelaksanaan WBBM dan WBK
			Lemahnya pemenuhan eviden evaluasi SAKIP, LPPD LKPD
			Masih rendahnya persepsi anti korupsi
			Masih ditemukannya gratifikasi dan pungutan liar oleh oknum aparat
			Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang zona integritas

Sumber : RPD Kota Bekasi 2024-2026

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Komitmen dan kompetensi APIP dalam mengevaluasi peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah se-Kota Bekasi yang akuntabel;
2. Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang terintegrasi;
3. Dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi terkait dengan Tujuan

Rencana Kerja 2025

Pertama yaitu “Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel”, maka Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Road Maps Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang kapabel dan kompeten.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti :

- a. Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko;
- b. Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala;

Rencana Kerja 2025

- c. Whistle blowing system belum berjalan efektif dan dimanfaatkan oleh seluruh aparatur;
- d. Penanganan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (berupa Peraturan Walikota);
- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system;
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan;
- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko;
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.4. *Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD*

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, tujuan “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”, Indikator kinerjanya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat”, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Kedua dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan

Rencana Kerja 2025

sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pemenuhan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Reviu terhadap Rancangan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

Rencana Kerja 2025

TABEL 2.17

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					52.275.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					52.275.000.000	
		Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%			Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%		
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%		
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%		
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	15.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah			100%	40.010.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah			100%	40.010.000.000	

Rencana Kerja 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang/bulan	40.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang/bulan	40.000.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	10.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	865.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	865.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	95.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	95.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang	770.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang	770.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	2.550.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	2.550.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Paket	350.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Paket	350.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Paket	350.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	55.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	55.000.000	

Rencana Kerja 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	250.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	250.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	500 Laporan	1.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	500 Laporan	1.500.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	360.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	360.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	60.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	20 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	20 Unit	300.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.510.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.510.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Margajaya	Bekasi Selatan	100 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Margajaya	Bekasi Selatan	100 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	24 Laporan	650.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	24 Laporan	650.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	850.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	850.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	6.965.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	6.965.000.000	

Rencana Kerja 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Unit	350.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Unit	450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Unit	450.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margajaya	Bekasi Selatan	200 Unit	165.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margajaya	Bekasi Selatan	200 Unit	165.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	6.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	6.000.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.075.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.075.000.000	
		Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			80%			Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			80%		
		Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal			91%			Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal			91%		
		Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel			100%			Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel			100%		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan			5 Dok	1.550.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan			5 Dok	1.550.000.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Lap	120.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Lap	120.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Lap	330.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Lap	330.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Margajaya	Bekasi Selatan	8 Lap	275.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Margajaya	Bekasi Selatan	8 Lap	275.000.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	225.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	225.000.000	

Rencana Kerja 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Kesepakatan	325.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Kesepakatan	325.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Margajaya	Bekasi Selatan	3 Dokumen	275.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Margajaya	Bekasi Selatan	3 Dokumen	275.000.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	2 Dokumen		5Dok	525.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan			5Dok	525.000.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	175.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	175.000.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Margajaya	Bekasi Selatan	7 Laporan	350.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Margajaya	Bekasi Selatan	7 Laporan	350.000.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				-	1.975.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.975.000.000	
		Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01			36%			Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01			36%		
		Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas			98%			Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas			98%		
		Level Kapabilitas APIP			3			Level Kapabilitas Apip			3		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan			5 Dok	775.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan			5 Dok	775.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Rekomendasi	550.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Rekomendasi	550.000.000	

Rencana Kerja 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Rekomendasi	225.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Rekomendasi	225.000.000	
2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi			5 Dok	1.200.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi			5 Dok	1.200.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Margajaya	Bekasi Selatan	3 PD	250.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Margajaya	Bekasi Selatan	3 PD	250.000.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	300.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	300.000.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Kegiatan	500.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Kegiatan	500.000.000	
	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	150.000.000	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	150.000.000	
						56.325.000.000						56.325.000.000	

Rencana Kerja 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak mendapat usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Tingkat Kota maupun melalui hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

TABEL 2.17
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA BEKASI

Nama SKPD : Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

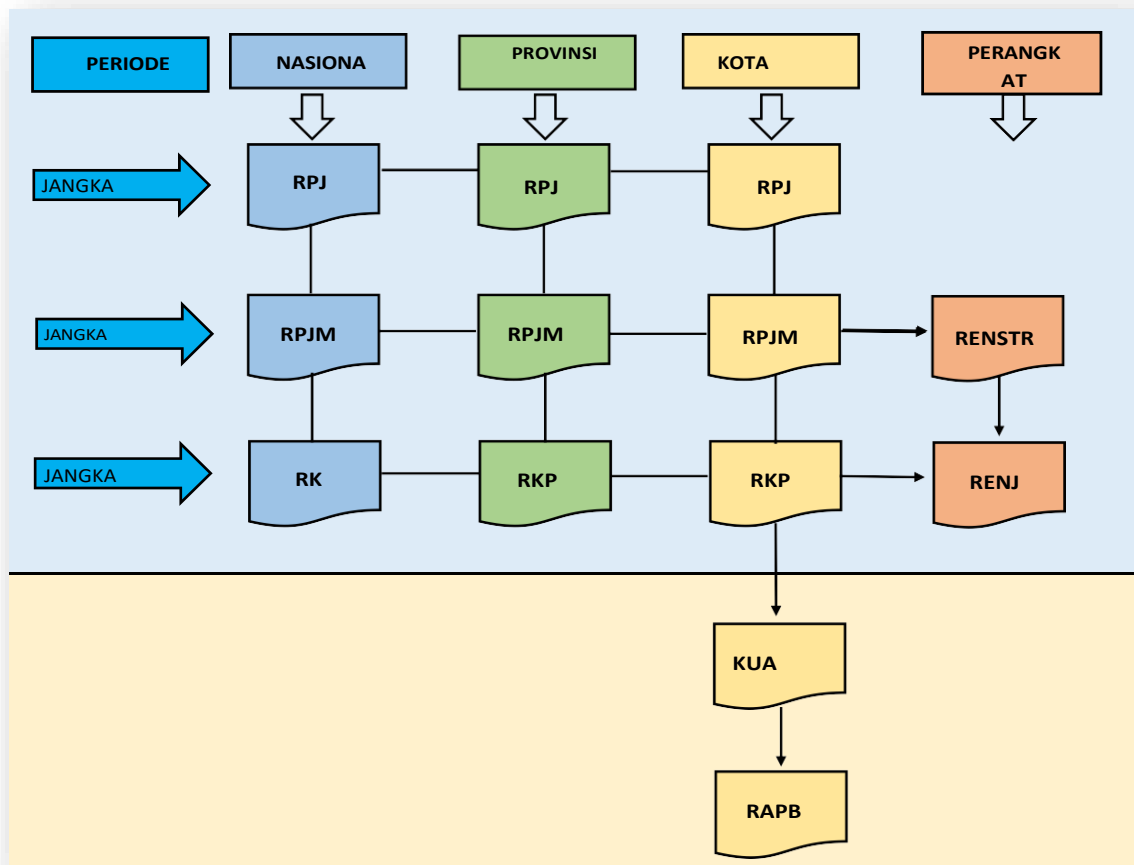
B A B III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Gambar 3.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi



Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan pusat/nasional karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain,

Rencana Kerja 2025

target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional.

Lima fokus arahan Presiden Republik Indonesia pada kurun 2020-2025 ini yaitu :

1. Pembangunan Sumber daya manusia, dengan prioritas utama :
 - Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, trampil, menguasai iptek;
 - Mengundang kerjasama dengan dengan talenta-talenta global;
 - Mengoptimalkan kerjasama dengan insdustri; dan
 - Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan insfrastruktur, dengan prioritas utama :
 - Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama:
 - Menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama:
 - Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang Menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan kepada sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja 2025

Telaahan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan nasional yaitu terkait arah kebijakan dan/atau tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sementara itu, tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 antara lain:

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026 akan mengacu pada ketentuan dalam Inmendagri No. 52 Tahun 2022. Sementara secara teknis, hubungan kedua dokumen perencanaan jangka menengah ini dan penyesuaian yang dilakukan akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Telaahan juga dilakukan Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja PD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis PD yang akan ditangani pada Renja PD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja 2025

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**, dengan indikator tujuan yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, dalam bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
- 3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun identifikasi risiko;
- 5) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 6) Manajemen Anti Suap dan gratifikasi;
- 7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 8) Penanganan dan pengaduan whistleblowing system;
- 9) Penanganan benturan kepentingan.

Rencana Kerja 2025

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Untuk mencapai tujuan maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran yaitu: **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”**.

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	73.12
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Inspektorat	84.30

3.3. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan Misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel;
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan Sasaran Tahunan Inspektorat untuk kurun waktu lima tahunan.
 1. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
Indikator sasaran :
 - 1.1 Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat.
 - 1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.

Rencana Kerja 2025

2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;

Indikator sasaran :

1.1 Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya > BB.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;

Indikator sasaran :

3.1 Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.

3.2 Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang opini atas LKPD adalah WTP.

4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas;

Indikator sasaran :

4.1 Tingkat maturitas implementasi SPIP.

4.2 Nilai Indikator RAD-PPK.

5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Indikator sasaran :

Tingkat Kapabilitas APIP.

Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemehntahan daerah	1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat
		2	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	3	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
		4	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIPnya adalah BB
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	5	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat
		6	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP
4	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas	7	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		8	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan	9	Tingkat Kapabilitas APIP

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat Perubahan 2018-2023

3.4. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Inspektorat Daerah adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan, fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.

Rencana Kerja 2025

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
1					2	3	4	9	10	7	8		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				52.275.000.000				58.970.000.000
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%				100%	
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	15.000.000			100%	15.000.000
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	15.000.000
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	40.010.000.000	PAD		100%	45.010.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	120 Orang/bulan	40.000.000.000	PAD		120 Orang/bulan	45.000.000.000
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	865.000.000			100%	960.000.000
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	95.000.000	PAD		1 Paket	120.000.000
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	120 Orang	770.000.000	PAD		120 Orang	840.000.000
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.550.000.000			100%	2.810.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	45.000.000	PAD		1 Paket	50.000.000
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	350.000.000	PAD		4 Paket	400.000.000
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	350.000.000	PAD		2 Paket	400.000.000
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.000.000	PAD		1 Dokume	60.000.000
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	250.000.000	PAD		1 Laporan	300.000.000
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	500 Laporan	1.500.000.000	PAD		500 Laporan	1.600.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	360.000.000			100%	385.000.000
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Unit	60.000.000	PAD		1 Unit	60.000.000
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	20 Unit	300.000.000	PAD		20 Unit	325.000.000
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.510.000.000			100%	1.665.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	100 Laporan	10.000.000	PAD		100 Laporan	15.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	24 Laporan	650.000.000	PAD		24 Laporan	700.000.000
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	850.000.000	PAD		12 Laporan	950.000.000
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.965.000.000			100%	8.125.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	7 Unit	350.000.000	PAD		12 Unit	420.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	38 Unit	450.000.000	PAD		12 Unit	520.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	200 Unit	165.000.000	PAD		200 Unit	185.000.000
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	6.000.000.000	PAD		1 Unit	7.000.000.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.075.000.000	PAD			1.750.000.000
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal		80%				8000%	
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Eksternal		91%				91%	
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel		100%				100%	
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan		6 Dokumen	1.550.000.000			5 Dok	1.750.000.000
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	1 Lap	120.000.000	PAD		1 Lap	150.000.000
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	4 Lap	330.000.000	PAD		4 Lap	400.000.000
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Bekasi	8 Lap	275.000.000	PAD		8 Lap	300.000.000
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Bekasi	44PD	225.000.000	PAD		44PD	250.000.000
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Bekasi	1 Kesepakatan	325.000.000	PAD		1 Kesepakatan	350.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Bekasi	3 dokumen	275.000.000	PAD		3 Dokumen	300.000.000
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan		2 Dokumen	525.000.000			5 Dok	600.000.000
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Bekasi	1 Laporan	175.000.000	PAD		1 Laporan	200.000.000
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Bekasi	7 Laporan	350.000.000	PAD		7 Laporan	400.000.000
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			-	1.975.000.000	PAD			
						Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01		36,6					
						Level Kapabilitas APIP		Level 3					
						Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas		100%					
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan		2 Produk Kebijakan Pengawasan	775.000.000			5 Dok	900.000.000
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	1 Rekomendasi	550.000.000	PAD		1 Rekomendasi	600.000.000
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	2 Rekomendasi	225.000.000	PAD		2 Rekomendasi	300.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		4 Dokumen	1.200.000.000			5 Dok	1.300.000.000
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	3 PD	250.000.000	PAD		3 PD	300.000.000
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bekasi	44 PD	300.000.000	PAD		44 PD	350.000.000
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bekasi	2 Kegiatan	500.000.000	PAD		2 Kegiatan	500.000.000
6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bekasi	44 PD	150.000.000	PAD		44 PD	150.000.000
TOTAL									56.325.000.000				63.520.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah Kota Bekasi mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan urusan pengelolaan keuangan dan aset, aparatur, pembangunan dan pelayanan publik, serta pencegahan dan investigasi.

Untuk Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 (tujuh) dan sub kegiatan sebanyak 20 (duapuluh), 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan, dan 3. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub kegiatan.

Mengikuti Aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahirabn Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini meliputi 2 kegiatan:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Kerjasama Pengawasan Internal

Rencana Kerja 2025

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program ini meliputi 2 kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
- Program ini meliputi 7 kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan bahan logistic kantor

Rencana Kerja 2025

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Kerja 2025

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Hasil Verifikasi)

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
1					2	3	4	9	10	7	8		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				52.275.000.000				58.970.000.000
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%				100%	
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	225.885.000			100%	15.000.000
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	225.885.000	PAD		1 Laporan	15.000.000
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	38.447.795.600	PAD		100%	45.010.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	120 Orang/bulan	38.437.695.600	PAD		120 Orang/bulan	45.000.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	10.100.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	865.000.000			100%	960.000.000
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	234.000.000	PAD		1 Paket	120.000.000
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	120 Orang	2.109.902.000	PAD		120 Orang	840.000.000
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	3.387.914.530			100%	2.810.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	26.414.000	PAD		1 Paket	50.000.000
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	350.000.000	PAD		4 Paket	400.000.000
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	324.575.530	PAD		2 Paket	400.000.000
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.000.000	PAD		1 Dokume	60.000.000
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	PAD		1 Laporan	300.000.000
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	500 Laporan	2.331.925.000	PAD		500 Laporan	1.600.000.000
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.595.617.000			100%	385.000.000
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Unit	80.998.000	PAD		1 Unit	60.000.000
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	20 Unit	1.514.619.000	PAD		20 Unit	325.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	89.600.000			100%	1.665.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	100 Laporan	5.600.000	PAD		100 Laporan	15.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	24 Laporan	0	PAD		24 Laporan	700.000.000
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	84.000.000	PAD		12 Laporan	950.000.000
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			758.327.090			100%	8.125.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	7 Unit	131.200.000	PAD		12 Unit	420.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	38 Unit	526.288.000	PAD		12 Unit	520.000.000
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	200 Unit	100.839.090	PAD		200 Unit	185.000.000
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	0	PAD		1 Unit	7.000.000.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.671.444.000	PAD			1.750.000.000
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal		80%				8000%	

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Eksternal		91%				91%	
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel		100%				100%	
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan		6 Dokumen	2.300.722.000			5 Dok	1.750.000.000
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	1 Lap	132.124.000	PAD		1 Lap	150.000.000
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	4 Lap	1.334.908.000	PAD		4 Lap	400.000.000
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Bekasi	8 Lap	200.000.000	PAD		8 Lap	300.000.000
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Bekasi	44PD	358.740.000	PAD		44PD	250.000.000
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Bekasi	1 Kesepakatan	225.000.000	PAD		1 Kesepakatan	350.000.000
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Bekasi	3 dokumen	50.000.000	PAD		3 Dokumen	300.000.000
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan		2 Dokumen	1.370.672.000			5 Dok	600.000.000
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Bekasi	1 Laporan	160.000.000	PAD		1 Laporan	200.000.000
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Bekasi	7 Laporan	1.210.672.000	PAD		7 Laporan	400.000.000
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			-	3.702.420.940	PAD			

Rencana Kerja 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun N 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2026	
								Target	Pagu			Target	Pagu
						Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01		36,6					
						Level Kapabilitas APIP		Level 3					
						Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas		100%					
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan		2 Produk Kebijakan Pengawasan	1.361.739.940			5 Dok	900.000.000
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	1 Rekomendasi	623.281.000	PAD		1 Rekomendasi	600.000.000
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	2 Rekomendasi	738.458.940	PAD		2 Rekomendasi	300.000.000
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		4 Dokumen	1.200.000.000			5 Dok	1.300.000.000
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	3 PD	501.022.000	PAD		3 PD	300.000.000
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bekasi	44 PD	317.492.000	PAD		44 PD	350.000.000
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bekasi	2 Kegiatan	1.215.557.000	PAD		2 Kegiatan	500.000.000
6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bekasi	44 PD	306.610.000	PAD		44 PD	150.000.000
TOTAL									54.222.906.160				63.520.000.000

Rencana Kerja 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2023	Perkiraan Capaian Target 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Tahun 2025)				Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
						Target	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						46.849.041.220					58.970.000.000	
		Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%	100%					100%		
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					100%		
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%					100%		
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	100%					100%		
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%					100%		
6 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	225.885.000				100%	15.000.000	
6 1 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	13 Laporan	1 Laporan	225.885.000	Kota Bekasi	PAD		1 Laporan	15.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	38.447.795.600				100%	45.010.000.000	
6 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		110 Orang/Bulan	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	38.437.695.600	Kota Bekasi	PAD		120 Orang/bulan	45.000.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	10.100.000	Kota Bekasi	PAD		1 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Rencana Kerja 2025

6	1	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	2.343.902.000			100%	960.000.000	
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1 Paket	234.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Paket	120.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	120 Orang	100 Orang	2.109.902.000	Kota Bekasi	PAD	120 Orang	840.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	3.387.914.530			100%	2.810.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	26414000	Kota Bekasi	PAD	1 Paket	50.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	350.000.000	Kota Bekasi	PAD	4 Paket	400.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	324.575.530	Kota Bekasi	PAD	2 Paket	400.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Dokume	60.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Laporan	300.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	500 Laporan	2.331.925.000	Kota Bekasi	PAD	500 Laporan	1.600.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	1.595.617.000			100%	385.000.000	
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1 Unit	80.998.000	Kota Bekasi	PAD	1 Unit	60.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	25 Unit	20 Unit	1.514.619.000	Kota Bekasi	PAD	20 Unit	325.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	89.600.000			100%	1.665.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165 Laporan	12 Laporan	100 Laporan	5.600.000	Kota Bekasi	PAD	100 Laporan	15.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36 Laporan	24 Laporan	0	Kota Bekasi	PAD	24 Laporan	700.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.000.000	Kota Bekasi	PAD	12 Laporan	950.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Rencana Kerja 2025

6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	758.327.090				100%	8.125.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	7 Unit	12 Unit	131.200.000	Kota Bekasi	PAD		12 Unit	420.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	41 Unit	12 Unit	526.288.000	Kota Bekasi	PAD		12 Unit	520.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		239 Unit	156 Unit	200 Unit	100.839.090	Kota Bekasi	PAD		200 Unit	185.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	Kota Bekasi	PAD		1 Unit	7.000.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						3.671.444.000		PAD			1.750.000.000	
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			80%	80%					80%		
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Eksternal			91%	91%					91%		
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel			100%	100%					100%		

Rencana Kerja 2025

6	1	2	2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan			6 Dokumen	6 Dokumen	2.300.772.000				5 Dok	1.750.000.000	
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	1 Laporan		132.124.000	Kota Bekasi	PAD		1 Lap	150.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	1 Laporan		1.334.908.000	Kota Bekasi	PAD		4 Lap	400.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	6 Laporan		200.000.000	Kota Bekasi	PAD		8 Lap	300.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	1 Laporan		358.740.000	Kota Bekasi	PAD		44PD	250.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan		225.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Kesepakatan	350.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	Kota Bekasi	PAD		3 Dokumen	300.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan			2 Dokumen	2 Dokumen	1.370.672.000				5 Dok	600.000.000	
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Laporan	200.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	1.210.672.000	Kota Bekasi	PAD		7 Laporan	400.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Rencana Kerja 2025

6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					-	3.702.420.940		PAD				
					Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01			36,5	36,6					40			
					Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3					Level 3			
					Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas			100%	100%					100%			
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan			2 Produk Kebijakan Pengawasan	2 Produk Kebijakan Pengawasan	1.361.739.940			5 Dok	900.000.000		
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	623.281.000	Kota Bekasi	PAD		1 Rekomendasi	600.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	6 Rekomendasi	2 Rekomendasi	738.458.940	Kota Bekasi	PAD		2 Rekomendasi	300.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi			4 Dokumen	4 Dokumen	2.340.681.000			5 Dok	1.300.000.000		
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	3 PD	501.022.000	Kota Bekasi	PAD		3 PD	300.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 PD	317.492.000	Kota Bekasi	PAD		44 PD	350.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.215.557.000	Kota Bekasi	PAD		2 Kegiatan	500.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	44 Perangkat Daerah	44 PD	306.610.000	Kota Bekasi	PAD		44 PD	150.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
					TOTAL						54.222.906.160			-	63.520.000.000		

Rencana Kerja 2025

B A B V P E N U T U P

5.1 Catatan evaluasi awal dan rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk tahun kerja 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2025. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode terakhir RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif, Legislatif dan masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pemenuhan target pembangunan RPD.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* dan *outcome* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja ini melibatkan seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahirabn Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan Daerah, dengan turunan peraturan perundang-undangannya dipastikan akan mengubah model program, kodifikasi dan sistem

Rencana Kerja 2025

kinerja yang dibangun dan disesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Karena itu Renja tidaklah bersifat statis tetapi dinamis yang rumusan kebijakan dan rencananya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa kegiatan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab Rencana Kerja (RENJA) ini seyogyanya menjadi catatan dan bahan introspeksi bagi Inspektorat untuk mengambil langkah – langkah strategis untuk tidak terulang lagi pada Tahun 2025. Anggaran yang disediakan sudah cukup memadai dan mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, tinggal kini adalah usaha untuk merealisasikannya pada kinerja yang akan datang.

5.2 Kaidah pelaksanaan

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program yang tercantum dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah pedoman kerja untuk dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan, namun demikian pada praktiknya tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran;
2. Seluruh komponen di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 melalui Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, yang hasilnya dijadikan bahan bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan dan kerja yang maksimal.

Rencana Kerja 2025

Demikian Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja juga mendukung capaian kinerja pemerintah Kota Bekasi secara komprehensif.

Bekasi,

INSPEKTUR KOTA BEKASI,



[Handwritten signature]
IIS WISYNUWATI, S.Sos, CRA., CRP., CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002